

**KORUPSI DAN DINAMIKA POLITIK PADA PENANGANAN COVID – 19 DI
ACEH TAHUN 2020**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MUJIBURRAHMAN

210801038



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Mujiburrahman
NIM : 210801038
Tempat/Tanggal Lahir : Lhuet, 14 Maret 2003
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Korupsi dan Dinamika Politik Pada Penanganan Covid-19 di Aceh Tahun 2020

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 02 September 2025

Yang menyatakan,


Mujiburrahman
NIM 210801038



LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
KORUPSI DAN DINAMIKA POLITIK PADA PENANGANAN COVID-19 DI
ACEH TAHUN 2020

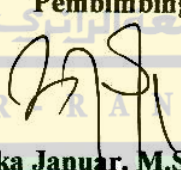
Di ajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry Banda Aceh sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu politik

Disusun Oleh :
MUJIBURRAHMAN
NIM. 210801038

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh

Disetujui Untuk Sidang Munaqasyah Skripsi Oleh :

Pembimbing


Eka Januar, M.Soc.Sc
NIP. 198401012015031001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

KORUPSI DAN DINAMIKA POLITIK PADA PENANGANAN COVID-19 DI ACEH TAHUN 2020

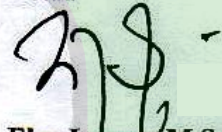
MUJIBURRAHMAN
210801038

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan Uin Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus Dan Diterima
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 20 Agustus 2025

Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Eka Januar, M.Soc.Sc
NIP. 198401012015031001

Sekretaris



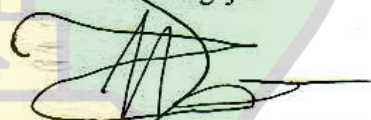
Shafiyur Rahman, S.A.P
NIP: -

Penguji I



Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A.
NIP: 196407051996031001

Penguji II



Renaldi Safriansyah, S.E., M.H.Sc., M.P.M
NIDN: 2007017903

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP.197403271999031005

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	x
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Penelitian	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.5.2 Manfaat Praktis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori.....	9
2.2.1 Teori jack bologne.....	9
2.2.2 Teori Klitgard	9
2.3 Kerangka Berfikir.....	10
BAB III METODE PENELITIAN	11
3.1 Lokasi Penelitian	11
3.2 Jenis Penelitian	11
3.3 Metode Pengumpulan Data	12
3.3.1 Wawancara (Interviews).....	12
3.3.2 Dokumentasi	13

3.4 Informan Penelitian	13
3.5 Sumber Data	13
3.6 Teknik Analisis Data	14
3.6.1 Data reduction (reduksi data).....	14
3.6.2 Data Display (penyajian data)	14
3.6.3 Conclution Drawing/ Verification	14
3.7 Jadwal Penelitian.....	15
3.8 Sistematika Penulisan.....	15
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	16
4.1 Penanganan Covid-19 di Aceh	16
4.2 Bentuk Korupsi yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Program Penanganan Covid-19 di Aceh Tahun 2020	22
4.3.2 Tinjauan dari Perspektif Hukum Pidana: Potensi Tindak Pidana Korupsi.....	37
4.3 Dinamika politik Terhadap Efektivitas Program Penanganan Covid – 19 di Aceh Tahun 2020	38
4.3.1 Relevansi Teori Klitgaard dalam Kasus Korupsi Dana Covid-19	42
4.4 Pembahasan	43
4.4.1 Kondisi Awal.....	43
4.4.2 Perubahan.....	46
BAB V PENUTUP.....	48
5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 4.2 Rincian Refocusing Kegiatan pada Dinas Sosial Aceh.....	22
Tabel 4.2.1 rincian temuan proyek westafel.....	33



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 kasus terkonfirmasi Covid-19 di Provinsi Aceh.....	18
Gambar 4.2.1 surat perintah kerja.....	29
Gambar 4.2.1Dokumen Kontrak Pengadaan Wastafel.....	31



DAFTAR LAMPIRAN

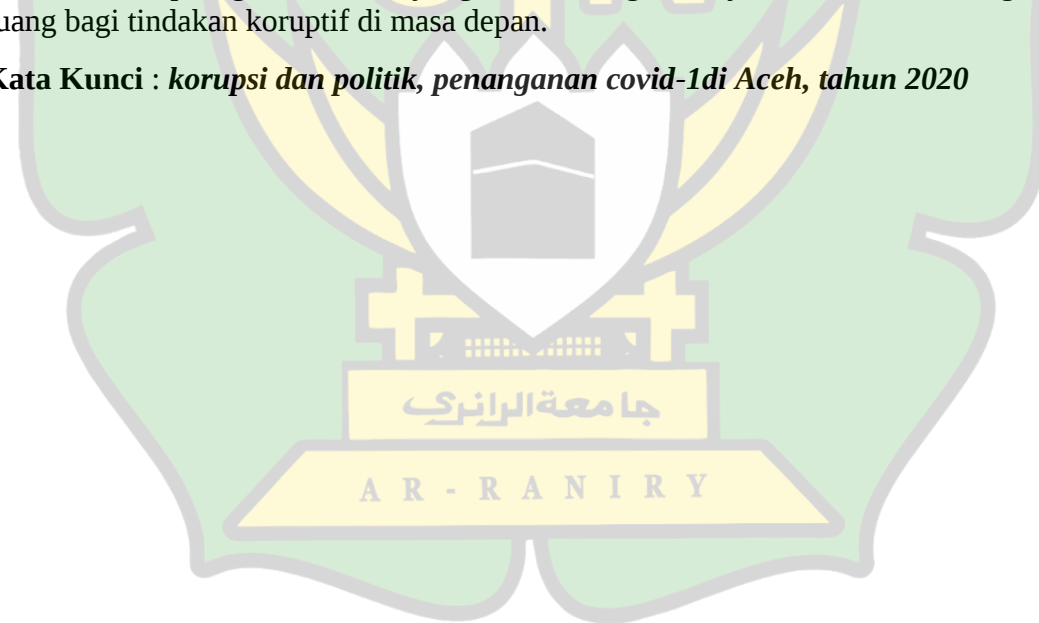
Lampiran 1 Surat Keputusan (SK) Skripsi.....	50
Lampiran 2 Surat Penelitian.....	51
Lampiran 3 Pedoman Wawancara.....	52
Dokumentasi Penelitian.....	54



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik korupsi dan dinamika politik dalam penanganan Covid-19 di Aceh pada tahun 2020. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa sejumlah program penanganan Covid-19 di Aceh sarat penyimpangan, seperti pengadaan wastafel oleh Dinas Pendidikan Aceh yang terindikasi mark-up, fiktif, serta dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Dinamika politik lokal, terutama pengaruh elite pascakonflik, memperburuk tata kelola anggaran dan menurunkan efektivitas program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa situasi darurat pandemi telah dimanfaatkan oleh sebagian aktor politik dan birokrasi sebagai peluang korupsi melalui mekanisme patronase dan lemahnya pengawasan. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi tata kelola dan penegakan hukum yang kuat dalam menghadapi bencana agar tidak dijadikan ladang korupsi oleh elite kekuasaan. Yang menjadi kesimpulannya pelaksanaan penanganan Covid-19 di Aceh pada tahun 2020 tidak lepas dari praktik korupsi dan pengaruh politik yang menghambat efektivitas kebijakan. Kondisi krisis dimanfaatkan oleh sebagian elit politik dan birokrat untuk keuntungan pribadi melalui praktik patronase, proyek-proyek fiktif, serta penggelembungan anggaran. Lemahnya sistem pengawasan dan dominasi kekuatan politik lokal semakin memperburuk pengelolaan program. Dengan demikian, diperlukan pembenahan tata kelola yang akuntabel dan penegakan hukum yang konsisten agar kebijakan darurat tidak lagi menjadi ruang bagi tindakan koruptif di masa depan.

Kata Kunci : *korupsi dan politik, penanganan covid-1 di Aceh, tahun 2020*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Swt, atas berkat karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala proses panjang yang penuh perjuangan, dan pembelajaran. Setiap lembar yang tertulis dalam karya ini bukan sekadar hasil dari rangkaian kata, tetapi adalah buah dari kegigihan, doa, serta dukungan tulus dari berbagai pihak yang senantiasa hadir dalam perjalanan dan perjuangan akademik penulis. Shalawat beriring salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw yang telah menjadi penerang bagi peradaban dunia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-I) pada Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Namun Skripsi ini tidak hanya disusun sebagai pemenuhan syarat akademik untuk meraih gelar sarjana, tetapi juga merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab penulis terhadap berbagai persoalan nyata di tengah masyarakat. Dalam proses penulisannya, penulis menyadari bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya sekadar kumpulan teori, melainkan seharusnya menjadi cahaya yang menerangi realitas kehidupan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah menerima banyak arahan, dukungan, motivasi, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Yang pertama, ucapan terima kasih yang terdalam penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta. Teristimewa untuk almarhum Ayah, yang meski telah tiada, semangat, doa, dan nilai-nilai hidup yang beliau wariskan tetap hidup dan masih ada menjadi penerang langkah dalam setiap proses perjuangan ini. Kepada Ibunda tercinta, terima kasih atas kasih sayang yang tiada batas, atas doa yang tak pernah putus, serta ketegaran yang menjadi kekuatan terbesar penulis dalam melewati berbagai tantangan. Tak lupa, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh keluarga besar, yang senantiasa memberikan

dukungan moral, motivasi, serta cinta yang begitu tulus. Kebersamaan dan kehangatan keluarga telah menjadi sumber semangat yang luar biasa dalam menyelesaikan karya ini.

2. Bapak Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Ramzi Murziqin, M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri ArRaniry
4. Bapak Eka januar, M. Soc. SC Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Kepada bapak dan ibu selaku Dosen Ilmu Politik yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
6. Rekan-rekan mahasiswa utamanya dari program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kepada informan penelitian yang telah memberikan dan membantu untuk melengkapi hasil temuan dalam skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan motivasi, pemikiran, dan semangat demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
9. Terimakasih untuk saya sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran dan mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sabik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
10. Terakhir, ucapan terima kasih yang istimewa penulis sampaikan kepada seseorang yang begitu berarti dalam perjalanan ini yaitu Putri Asmi Fadhliya.TK. S.E., Terima kasih atas cinta, pengertian, dan kesabaran yang tak pernah surut, bahkan di saat penulis hampir menyerah. Kehadiranmu bukan hanya menjadi sumber semangat, tetapi juga pengingat bahwa segala perjuangan ini memiliki makna yang lebih

dalam. Di setiap lelah, kau hadir membawa tenang, di setiap ragu, kau menjadi kekuatan yang tak tergantikan.

Semoga segala bentuk dukungan, bantuan, dan kerjasama yang telah diberikan dengan ikhlas hati mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Namun, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan renungan bagi semua pihak yang peduli pada keadilan dan perubahan sosial.

Banda Aceh, 02 September 2025

Mujiburrahman



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah masalah serius yang menggerogoti seluruh sistem pemerintahan dan kehidupan bernegara. Dampaknya meluas hingga ke bidang budaya, politik, dan ekonomi masyarakat, serta mengganggu fungsi-fungsi penting negara. Menurut Transparansi Internasional, korupsi termasuk salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Ia merusak tata kelola pemerintahan yang baik, menyimpangkan arah kebijakan publik, menyebabkan penyalahgunaan sumber daya, menghambat kemajuan sektor swasta, dan yang paling parah, sangat merugikan masyarakat miskin.¹ Pendekatan dalam mendefinisikan korupsi politik berbeda-beda. Dalam pandangan klasik, korupsi politik diartikan sebagai persoalan yang berkaitan dengan hubungan antara sumber kekuasaan dan hak-hak moral para penguasa. Saat ini, perdebatan mengenai korupsi politik lebih banyak berfokus pada persoalan kelembagaan dan perilaku. Dahulu, korupsi politik sering dikaitkan dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintahan monarki yang otoriter. Lord Acton sangat menyoroti ambisi kekuasaan yang dapat menyebabkan korupsi. Ia terkenal dengan pernyataannya bahwa kekuasaan cenderung menimbulkan korupsi, dan kekuasaan yang absolut akan menghasilkan korupsi yang absolut pula.²

Dalam pendekatan institusional, korupsi politik dipahami sebagai upaya mendapatkan keuntungan pribadi melalui fungsi dan wewenang kekuasaan. Korupsi dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dari tanggung jawab formal pejabat publik karena melibatkan kepentingan pribadi—baik individu, keluarga dekat, maupun kelompok tertentu—yang berkaitan dengan uang atau kekayaan. Tindakan ini juga melanggar aturan dalam pelaksanaan peran publik dan berpotensi mempengaruhi keputusan yang seharusnya netral. Bentuk-bentuk korupsi dalam konteks ini meliputi suap (memberi hadiah untuk memengaruhi penilaian seseorang yang seharusnya objektif), nepotisme (memberikan

¹ Transparency International, (15 desember 1998),

² J. Acton, *Essays on Freedom and Power*, London: Thames and Hudson, 1956, hlm. 18

posisi atau keuntungan berdasarkan hubungan keluarga, bukan kemampuan), serta penyalahgunaan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi secara tidak sah.³

Dalam pendekatan perilaku, korupsi politik dipandang sebagai bentuk hubungan khusus antara negara dan masyarakat, dan sering kali dianggap sebagai tindakan kriminal. Di satu sisi, negara diwakili oleh pegawai negeri, birokrat, politisi, atau siapa pun yang memiliki kewenangan dalam mengelola dan mendistribusikan sumber daya publik atas nama negara atau pemerintah. Korupsi muncul ketika individu-individu ini menyalahgunakan kekuasaan yang telah dipercayakan kepada mereka demi keuntungan pribadi. Ini terjadi, misalnya, saat mereka menerima suap atau imbalan lain sebagai ganti melakukan tindakan yang menyimpang dari tugas resmi mereka. Contoh korupsi termasuk pejabat yang menerima suap untuk memberikan layanan publik yang seharusnya gratis, atau menarik biaya lebih dari yang seharusnya. Dalam definisi alternatif, korupsi juga dilihat sebagai suatu bentuk pertukaran sosial yang tersembunyi, di mana kekuasaan politik atau administratif digunakan untuk keuntungan pribadi, menyimpang dari mandat atau fungsi resmi yang seharusnya dijalankan.⁴

Korupsi politik secara khusus Merujuk pada konsep kekuasaan dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat tinggi dalam sistem politik. Korupsi ini terjadi ketika para politisi dan lembaga negara yang seharusnya membuat serta memberlakukan undang-undang demi kepentingan masyarakat justru menjadi pelaku praktik korupsi. Dalam hal ini, mereka menggunakan kewenangan politik yang dimiliki untuk mempertahankan kekuasaan, status, dan kekayaan pribadi. Korupsi politik berbeda dari korupsi birokrasi atau korupsi kecil, yang biasanya terjadi di tingkat administratif dan sering kali dikendalikan atau dipengaruhi oleh keputusan politik. Meskipun dalam praktiknya batas antara korupsi politik dan birokrasi bisa kabur—karena batasan antara ranah politik dan administrasi tidak selalu jelas dalam sebagian besar sistem pemerintahan—pembedaan antara keduanya tetap penting baik dalam analisis ilmiah maupun dalam penerapan

³ J. Nye, Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analsis dalam R. William (ed), The Politics of Corruption, Explainning Corruption, Checktenham, UK: An Edwrad Elgar Publishing Limited, 1967, hlm. 47.

⁴ Merry terdapat dalam de Sardan J.P.Olivier, A Moral Economy of Corruption in Afrika, in The Journal of Modern African Studies, Vol. 37, No.1, 1999, hlm. 49.

kebijakan. Korupsi politik, yang terjadi pada tingkat pemerintahan atas, memiliki dampak besar terhadap sistem politik secara keseluruhan.

Korupsi politik tidak hanya terbatas pada cakupan sumber daya, tetapi juga berdampak pada proses pengambilan keputusan. Korupsi ini melibatkan manipulasi terhadap lembaga-lembaga politik dan aturan-aturan prosedural, sehingga dapat merusak institusi pemerintahan dan tatanan politik secara menyeluruh. Akibatnya, korupsi politik sering menyebabkan kerusakan pada struktur kelembagaan. Dengan demikian, korupsi politik tidak sekedar merupakan pelanggaran terhadap norma hukum formal, kode etik profesional, atau aturan sistem peradilan, melainkan merupakan tindakan yang lebih dalam dan sistematis. Korupsi ini terjadi ketika undang-undang dan peraturan disalahgunakan secara terencana oleh pihak yang berkuasa—baik dengan mengabaikan prosedur, tidak menjalankannya sebagaimana mestinya, atau bahkan merancang aturan sedemikian rupa agar menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok.⁵

Dalam konteks penanganan Covid-19 di Aceh, sejumlah kasus korupsi yang terungkap menunjukkan adanya keterkaitan erat dengan dinamika politik daerah, terutama dalam hal pengelolaan anggaran dan distribusi sumber daya. Proses pengambilan keputusan politik sangat menentukan bagaimana anggaran dialokasikan dan sejauh mana program-program yang dijalankan dapat berjalan secara efektif. Di Aceh, kekuatan dan arah kepemimpinan politik memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, termasuk dalam hal pengawasan serta implementasi kebijakan tersebut. Penegakan hukum pun tidak jarang dipengaruhi oleh pertimbangan politik, termasuk adanya intervensi dari pejabat politik yang mungkin memiliki kepentingan untuk melindungi kelompok tertentu dari jerat hukum.⁶

Hal ini memperlihatkan bahwa budaya birokrasi di Aceh masih sangat lekat dengan praktik koruptif yang sudah mengakar sebelum pandemi, dan semakin terbuka selama krisis berlangsung. Fenomena ini tidak terlepas dari warisan birokrasi gaya lama yang

⁵ Sesuai dengan Carbonell-Catilo, Presiden Filipina, Ferdinand Marcos contohnya memperbarui pasal Konstitusi Philipina untuk mengesahkan perampasan kekayaan bangsanya (tercantum dalam Johnston Michael, *The Search for Definition; The Vitality of Politics and The Issue of Corruption*” in *International Social Science Journal* Vol.48, No.3, September 1996, hlm. 323).

⁶ ICW. (2021). *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

memperlakukan jabatan publik sebagai sumber kekuasaan dan keuntungan ekonomi. Dalam sistem seperti ini, penanganan krisis bukan difokuskan untuk menyelamatkan rakyat, tetapi sebagai kesempatan untuk memperbesar kekuasaan dan memperkaya diri. Sebagaimana disebutkan dalam jurnal tersebut, posisi sebagai pejabat publik dipandang sebagai simbol status dan akses terhadap sumber daya negara, bukan sebagai pelayan masyarakat.

Oleh karena itu, memahami dimensi politik dan korupsi dalam penanganan Covid-19 di Aceh tidak bisa dilepaskan dari struktur kekuasaan lokal yang dibentuk oleh praktik kleptokrasi dan patrimonialisme. Tanpa reformasi yang serius terhadap tata kelola pemerintahan dan budaya birokrasi, setiap situasi darurat akan selalu menjadi peluang korupsi, bukan momentum perbaikan. Studi ini menjadi penting untuk menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar tindakan individu, melainkan bagian dari sistem politik yang sistematis dan terorganisir, khususnya di wilayah-wilayah pascakonflik seperti Aceh.⁷

Dalam penelitian ini, penulis menguraikan hubungan erat antara korupsi dan politik, khususnya dalam konteks penanganan Covid-19 di Aceh pada tahun 2020. Politik memiliki peran penting dalam pengelolaan anggaran, di mana keputusan politik sangat memengaruhi bagaimana dana penanganan Covid-19 dialokasikan dan digunakan. Politik anggaran dan pengelolaan sumber daya menjadi faktor krusial, dengan elit politik yang berperan menentukan besaran serta realisasi anggaran tersebut. Korupsi juga muncul akibat dinamika politik, termasuk kepentingan partai dan aktor politik di tingkat daerah, yang menyebabkan penyimpangan dalam distribusi bantuan dan sumber daya lainnya. Penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi sering kali dipengaruhi oleh intervensi politik, di mana pejabat atau kelompok dengan kekuatan politik berupaya melindungi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penanganan Covid-19 di Aceh sangat terkait dengan faktor politik, yang menjadi arena yang menyediakan peluang, perlindungan, bahkan pembenaran bagi praktik korupsi.

⁷ Muhammad bin Abubakar, *The Causes of Bureaucratic Petty Corruption in the Province of Aceh in Indonesia*, *Malikussaleh Social & Political Reviews*, hlm. 1–4.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa penting untuk menganalisis berbagai perspektif dari para pihak terkait mengenai praktik korupsi yang terjadi selama penanganan Covid-19 di Aceh pada tahun 2020. Selain itu, penulis ingin mengeksplorasi pandangan ke depan guna meningkatkan kesadaran para pemimpin dalam melaksanakan tugasnya secara benar dan tepat. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk mengangkat topik ini dalam skripsi dengan judul **“Korupsi dan Dinamika Politik Pada Penanganan Covid-19 di Aceh Tahun 2020.”**

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan atau arah utama dalam suatu penelitian yang menunjukkan objek kajian, permasalahan utama, serta ruang lingkup pembahasan yang akan dikaji secara mendalam oleh peneliti. Fokus ini penting agar penelitian tidak melebar ke hal-hal yang tidak relevan, serta memudahkan peneliti untuk menggali data dan menyusun analisis secara sistematis dan terarah. Fokus penelitian adalah batasan yang ditentukan oleh peneliti mengenai hal-hal yang akan diteliti agar pelaksanaan penelitian tidak meluas ke mana-mana dan tetap terarah.⁸

Penelitian ini akan berfokus pada beberapa aspek utama yang menghubungkan politik, korupsi, dan penanganan Covid -19 di Aceh.

1. Korupsi dalam penanganan Covid-19

Penelitian akan memeriksa sejauh mana praktik korupsi terjadi dalam penanganan Covid-19, baik itu dalam pengadaan alat kesehatan, pembelian vaksin, hingga distribusi bantuan sosial.

2. Dampak korupsi terhadap efektivitas penanganan pandemi

Penelitian ini juga akan menilai dampak dari praktik korupsi terhadap efektivitas penanganan pandemi di Aceh, baik dalam hal kecepatan distribusi bantuan, keterjangkauan pelayanan kesehatan, maupun pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak.

3. Dinamika politik dalam penanganan Covid-19 di Aceh

⁸ Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya

Penelitian ini akan menganalisa bagaimana keterkaitan politik dalam kasus-kasus korupsi yang terjadi dan bagaimana politik mempengaruhi faktor-faktor penanganan Covid-19.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana korupsi pada pelaksanaan program penanganan Covid-19 di Aceh pada tahun 2020 ?
2. Bagaimana hubungannya dinamika politik dengan efektivitas program penanganan Covid-19 di Aceh pada tahun 2020 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai hal yang ingin dicapai oleh peneliti dari suatu kegiatan penelitian. Tujuan ini berkaitan langsung dengan rumusan masalah dan fokus penelitian, serta menjadi arah atau hasil akhir dari proses penelitian itu sendiri. Penelitian bertujuan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan ilmiah dengan prosedur sistematis dan logis.⁹

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan program penanganan Covid-19 di Aceh tahun 2020.
2. Untuk menganalisis hubungan dinamika politik dengan kebijakan dan implementasi penanganan Covid-19 di Aceh tahun 2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat antara lain :

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Manfaat teoritis penelitian ini, yaitu diharapkan dapat memperkaya bahan keilmuan dalam bidang politik, ilmu sosial dan pemerintahan.

⁹ Best, J. W., & Kahn, J. V. (2006). Research in Education (10th ed.). Boston: Pearson Education.

2. Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi akademik dalam perkembangan konsep dan teori ilmu politik dan pemerintahan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti/penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat memberikan informasi secara tertulis mengenai faktor-faktor dan skema yang terjadi dalam penanganan Covid-19 di Aceh tahun 2020.
2. Setelah penelitian ini dilakukan penulis berharap nantinya menjadi referensi ilmiah yang berkaitan dengan ilmu politik.

